



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mejobo No. 35 Kudus Kode Pos 59319

Telp. (0291) 437124 Faks. (0291) 437124

Email : inspektoratkabkudus@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kudus untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Kudus, 17 Maret 2021



INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS,

Ir. ADHY HARDJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620128 198901 1 002



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Kudus Tahun 2020, Alhamdulillah sudah bias disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat Kabupaten Kudus dalam pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Kudus ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa datang.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan target dan realisasi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Kabupaten Kudus, serta dukungan instansi dan masyarakat dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus yang Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Kudus Tahun 2020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus,

Maret 2021



PIR. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

DR. HM. HARTOPO, ST, MM, MH



DAFTAR ISI

Halaman

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. KONDISI GEOGRAFI	2
	C. PERANGKAT DAERAH	3
	D. DUKUNGAN SUMBER DAYA	11
	E. ISU STRATEGIS	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. RENCANA KINERJA	16
	B. PERJANJIAN KINERJA	38
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	39
	B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	41
	C. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	85
	D. EFISIENSI ANGGARAN	90
	E. IMPLEMENTASI RENCANA AKSI	98
BAB IV	PENUTUP	
	A. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	102
	B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	106
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
	1. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TAHUN 2020	
	2. TARGET IKU TAHUN 2019-2023	



DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1.1.	Peta Letak Geografi Kabupaten Kudus di Peta Jawa Tengah	2
Gambar 1.2.	Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016)	7
Tabel 1.1.	APBD Tahun 2020	12
Tabel 2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 2.2.	Strategi dan Kebijakan	24
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis, IKU dan Program	30
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kabupaten Kudus	38
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	40
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2020	41
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020	48
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarakat Tahun 2020	55
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	57
Tabel 3.6.	Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	60
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2020	63
Tabel 3.8.	Perhitungan Indeks Rasa Aman	64
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020	67
Tabel 3.10.	Penduduk miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	70
Tabel 3.11.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2020	71



Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2020	73
Tabel 3.13.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2020	75
Tabel 3.14.	Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	75
Tabel 3.15.	Kondisi Daerah Irigrasi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	76
Tabel 3.16.	Kondisi Saluran Drainase di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	76
Tabel 3.17.	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	77
Tabel 3.18.	Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	77
Tabel 3.19.	Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	78
Tabel 3.20.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Tahun 2020	81
Tabel 3.21.	Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2020	82
Tabel 3.22.	Alokasi Anggaran Program Tahun 2020	85
Tabel 3.23.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	90
Tabel 3.24.	Rencana Aksi dalam rangka Akselerasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020	98
Tabel 4.1.	Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2020	102
Grafik 1.1.	Presentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	11
Grafik 1.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan Struktural Tahun 2019-2020	12
Grafik 3.1.	Banyaknya Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	44



Grafik 3.2.	Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	45
Grafik 3.3.	Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	45
Grafik 3.4.	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	53
Grafik 3.5.	Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	54
Grafik 3.6.	Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus dan daerah sekitar Tahun 2019-2020	70
Grafik 3.7	Panjang Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020. Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2019 yang kemudian diadakan perubahan yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai bentuk komitmen pimpinan mulai dari Kepala Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah menandatangani Perjanjian Kinerja.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah analisis pengukuran kinerja dan evaluasi yang memadai.



B. KONDISI GEOGRAFI

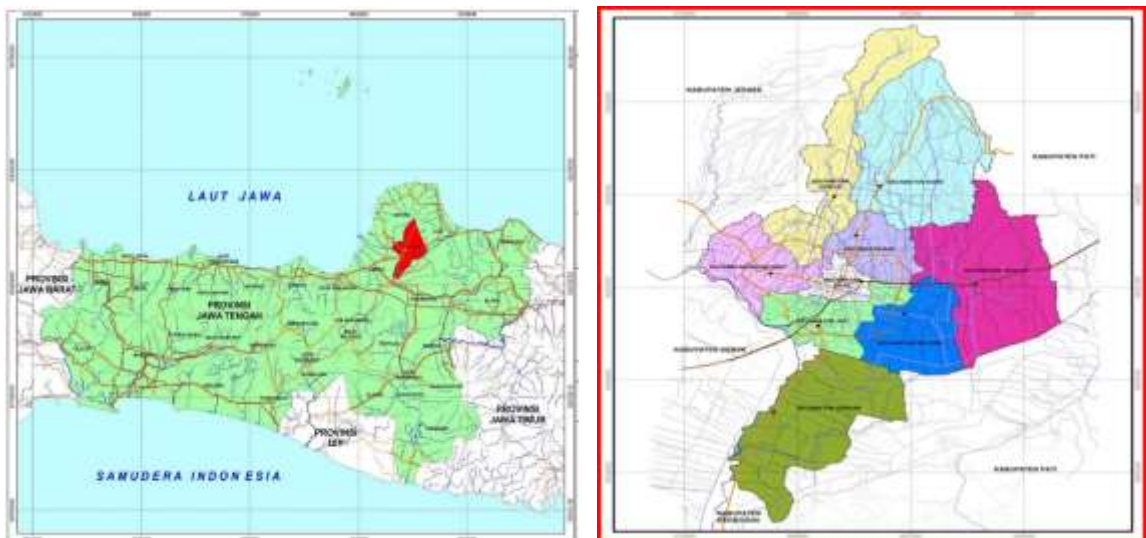
Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah Selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, serta sebelah Barat dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Posisi astronomis Kabupaten Kudus berada antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Secara posisi geostatis Kabupaten Kudus masuk dalam kawasan pesisir dan pegunungan namun tidak terletak di tepi pantai dengan kondisi tanah datar 0° di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus, sampai dengan sangat curam $\pm 40^\circ$ untuk wilayah utara Kabupaten Kudus / kawasan pegunungan Muria. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan utara keselatan 22 km.

Wilayah administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat 42.516 hektar, atau lebih kurang 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus.

Untuk mengetahui secara lebih detail keadaan geografi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Peta berikut ini :

Gambar 1.1.
Peta Letak Geografi Kabupaten Kudus
Di Peta Jawa Tengah



Sumber Data : Kabupaten Kudus Dalam Angka 2020



C. PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan otonomi dan urusan konkuren, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupten Kudus telah ditindaklanjuti dengan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Kudus yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dengan :

- a. Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28



Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 9 Bagian yaitu :

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 3. Bagian Hukum
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
 1. Bagian Perekonomian
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Asisten Administrasi Umum :
 1. Bagian Umum
 2. Bagian Organisasi
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

b. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Perdagangan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
14. Dinas Pertanian dan Pangan
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan
16. Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.



- d. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus yaitu :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan
 - 3. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf ahli Bupati yaitu :
 - 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
- f. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yaitu :
 - 1. Kecamatan Bae
 - 2. Kecamatan Dawe
 - 3. Kecamatan Gebog
 - 4. Kecamatan Jati
 - 5. Kecamatan Kota
 - 6. Kecamatan Kaliwungu
 - 7. Kecamatan Mejobo
 - 8. Kecamatan Jekulo
 - 9. Kecamatan Undaan
- g. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
- h. Untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih menggunakan Perda lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

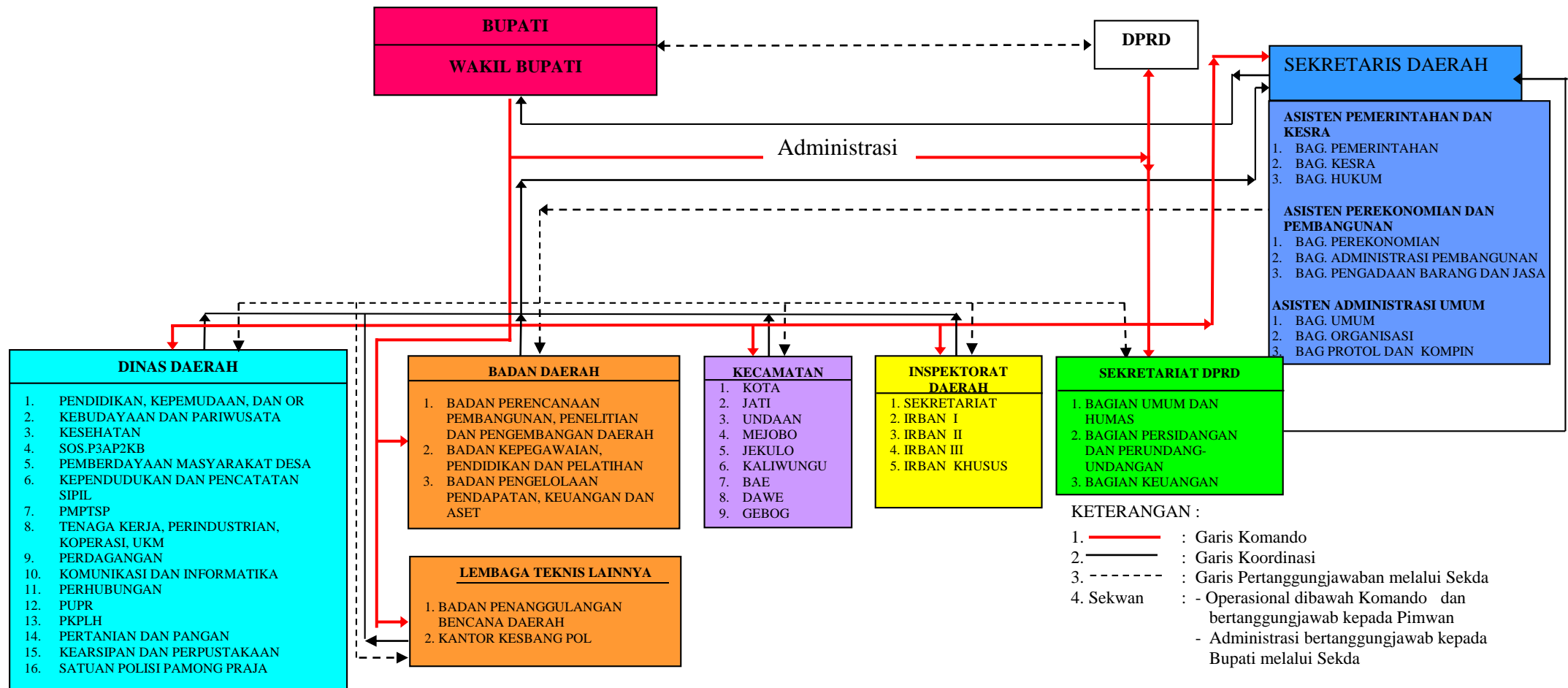


Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kudus menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Kudus telah melaksanakan Perubahan kelembagaan pada RSUD Dr. Loekmonohadi sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dengan menambahkan Inspektur Pembantu Khusus. Sedangkan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Kabupaten Kudus telah merubah kelembagaan pada 19 (sembilan belas) UPTD Puskesmas.

Adapun Pola Hubungan antar Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai berikut :



Gambar 1.2.
BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
(BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016)





D. DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

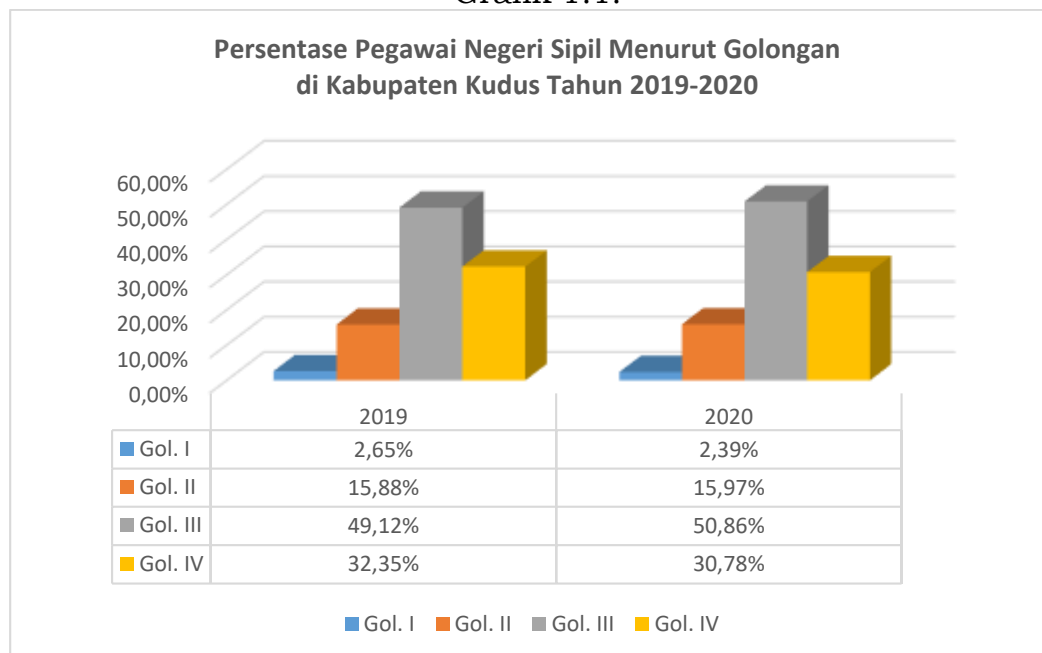
Pada akhir Tahun 2020 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus sebanyak 6.657 orang. Bila dilihat menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

- SD 120 orang (1,80%)
- SLTP/ sederajat 157 orang (2,36%)
- SLTA/ sederajat 1.050 orang (15,77%)
- D1 13 orang (0,20%)
- D2 327 orang (4,91%)
- D3 675 orang (9,42%)
- S1/D4 4.028 orang (60,51%)
- S2 285 orang (4,28%)
- S3 2 orang (0,03%)

Sedangkan bila dilihat menurut Golongan sebagai berikut :

- Golongan I (2,39%)
- Golongan II (15,97%)
- Golongan III (50,86%)
- Golongan IV (30,78%)

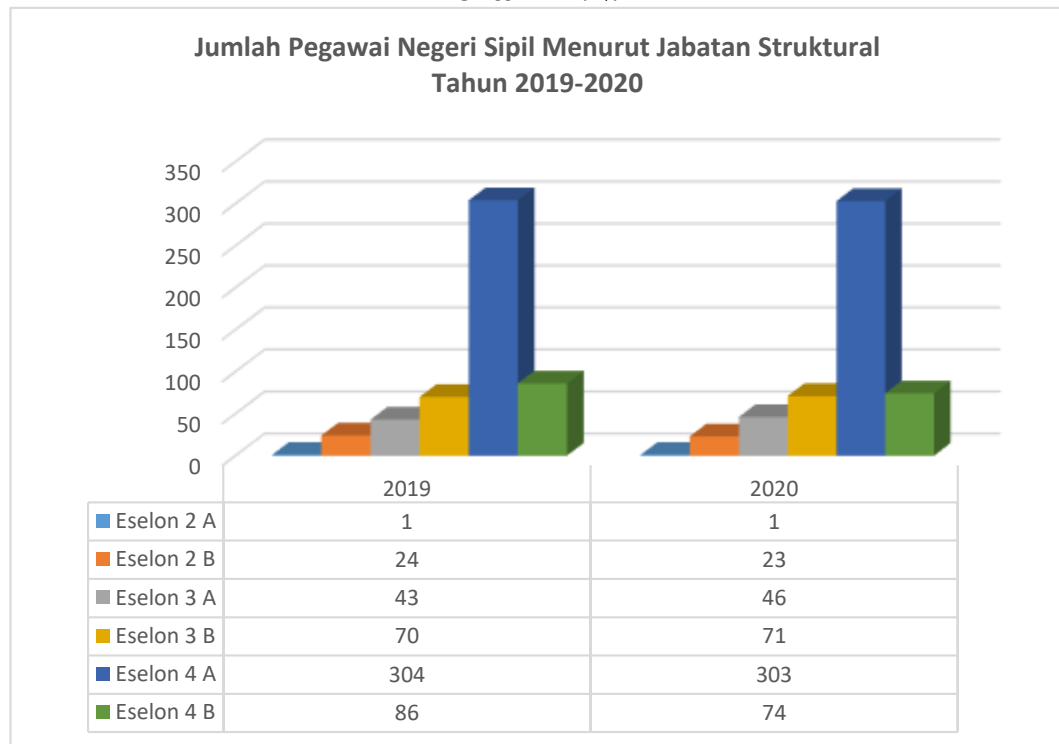
Grafik 1.1.



Sumber data : BKPP Tahun 2020



Grafik 1.2.



Sumber data : BKPP Tahun 2020

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kinerja Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, telah menetapkan anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.1
APBD Tahun 2020

No.	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi
a.	Pendapatan Daerah	1.967.081.016.390	2.014.951.060.575
1.	Pendapatan Asli Daerah	291.643.884.000	383.872.770.319
2.	Dana Perimbangan	1.206.873.864.390	1.183.590.147.772
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	468.563.268.000	447.488.142.484
b.	Belanja Daerah	2.151.998.364.390	1.914.008.013.553
1.	Belanja Tidak Langsung	1.219.987.749.000	1.119.802.950.456
2.	Belanja Langsung	930.010.615.390	794.205.063.097
c.	Surplus/(defisit)	(184.917.348.000)	100.143.047.022

Sumber data : Simda Tahun 2020 (belum ada pemeriksaan dari BPK)



E. ISU STRATEGIS

a. Kesehatan

1. Kabupaten Kudus terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dirasakan oleh masyarakat dan jajaran Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I Tahun 2020 yang menimbulkan kebijakan dilaksanakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID 19. Hal tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian Indikator Kinerja Utama, baik di tingkat Perangkat Daerah maupun di tingkat Kabupaten, dengan strategi penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat berpengaruh signifikan dengan target yang sudah direncanakan baik di RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah seiring dengan penanganan COVID 19 di Kabupaten Kudus. Dengan adanya Pandemi COVID 19 dampak yang terjadi ditengah masyarakat yaitu permasalahan ekonomi diantaranya pertambahan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang dapat menimbulkan permasalahan sosial.
2. Selain COVID 19 dalam bidang kesehatan yang perlu mendapatkan serius adalah angka kematian bayi pada tahun 2020 yaitu 8,26 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 101,57 per 100.000 kelahiran hidup. Sebagai bahan evaluasi kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan upaya untuk menurunkan angka tersebut dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Penyelenggaraan Pendidikan di masa Pandemi COVID-19

Seiring dengan pandemi COVID 19 sistem penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar berubah dari yang semula tatap muka menjadi sistem virtual/daring, secara target pencapaian materi kurikulum sesuai dengan jenjang tidak terlalu mengalami kendala, namun yang perlu mendapatkan perhatian bahwa pendidikan juga membentuk karakter siswa didik sehingga akan



terbentuk jiwa nasionalisme yang tinggi serta memiliki budi pekerti yang luhur. Hal tersebut akan dapat dikembangkan apabila pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara langsung sehingga ada interaksi antara pendidik dan siswa didik. Namun dengan adanya pandemi COVID 19 hal tersebut sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan meskipun sudah diatur dengan protokol kesehatan tetapi dalam rangka untuk mencegah dan mengantisipasi perkembangan COVID 19 maka Pemerintah Kabupaten Kudus masih belum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pendidikan secara tatap muka. Strategi dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini melibatkan seluruh satuan pendidikan tingkat dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta hasil penyelenggaraan proses pendidikan di semua sekolah.

- c. Kualitas sarana dan prasarana publik yang perlu ditingkatkan
Sarana dan prasarana di Kabupaten Kudus pada Tahun 2020 belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat pada kondisi jalan di Kabupaten Kudus dengan kriteria mantap sebesar 91,94%. Namun dengan adanya kondisi cuaca di akhir tahun 2020 yang cukup ekstrim berdampak pada fasilitas publik berupa jalan yang harus selalu mendapat perhatian dalam bentuk pemeliharaan karena dapat berdampak pada kenyamanan pengguna jalan dalam beraktifitas dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Selain itu juga sarana dan prasarana publik pada sektor pelayanan yang sudah direncanakan pada Tahun 2020 yaitu Pembangunan Mall Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan dan pengintegrasian sistem pelayanan secara terpadu di Kabupaten Kudus bersama dengan Instansi Vertikal namun belum dapat terealisasi karena adanya *refocusing* anggaran. Kabupaten Kudus sudah berkomitmen dengan Kementerian PAN RB untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik di tahun yang akan datang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

P

EMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL, DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH DAN PENGATURAN SUMBER DAYA NASIONAL YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PENINGKATAN DEMOKRASI DAN KINERJA DAERAH DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus telah berpedoman pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan berbagai dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 (berlaku per 22 Maret 2019) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus No 23 Tahun 2019, Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2019 yang kemudian diadakan perubahan yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020.

Penjabaran lebih lanjut dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :



A. RENCANA KINERJA

1. VISI DAN MISI

- **VISI**

**KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS,
CERDAS DAN SEJAHTERA**

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

1) Bangkit.

Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

2) Modern.

Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3) Religius.

Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.



4) Cerdas.

Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

5) Sejahtera.

Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

• MISI.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

KEDUA

Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

KETIGA

Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

KEEMPAT

Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam



perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM.



Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antar agama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.



Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/ TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.



2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Pembangunan Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan **Masyarakat Kudus Yang Semakin Sejahtera** sesuai dengan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Kudus Bangkit menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera							
Misi 1	Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovasi memanfaatkan teknologi dan multimedia							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahunan					Target Akhir periode RPJMD 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,97	14,20	14,44	14,67	14,90	14,90
		Rata-rata Lama Sekolah	8,45	8,50	8,70	9,01	9,20	9,20
		Persentase akses dan mutu pendidikan	87,07	87,31	87,54	87,77	88,00	88,00
	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat	Angka Harapan Hidup	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
		Angka Kematian Ibu	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
		Angka Kematian Bayi	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp./org/thn)	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	11.413,19	11.413,19



Misi 2	Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahunan					Target Akhir periode RPJMD 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	69,17	74	79	85	90	90
		Nilai akuntabilitas kerja	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00
		Akuntabilitas pegelola keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	82	83	83,5	85	85
Misi 3	Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahunan					Target Akhir periode RPJMD 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks rasa aman	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
		Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Misi 4		Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahunan					Target Akhir periode RPJMD 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
		Angka Kemiskinan	6,7	6,45	6,21	6,1	5,9	5,9
		Angka Pengangguran	3,30	3,25	3,15	3,05	2,90	2,90
	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi (dalam triliun rupiah)	7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	9,19
	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	79,71	80,72	81,72	82,72	83,73	83,73
	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,92	64,13	65,34	66,56	67,77	67,77

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023



Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan target kinerja di RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki strategi dan arah kebijakan yang sudah disusun dengan harapan tahapan pencapaian target kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2020
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian yang kokoh didukung Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, dengan prioritas : 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif; 2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; 3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 5. Pemanfaatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	
		Pemberian BOS dan Beasiswa	
		Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS	
		Peningkatan pengelolaan perpustakaan	
		Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan	
		Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	
2.	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi	
		Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative terhadap penyakit menular dan tidak menular	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2020
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan pembinaan kepemudaan Penerapan pola hidup sehat dan pemasalan olah raga Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang	
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan Peningkatan produksi dan produktivitas pangan Peningkatan pola konsumsi masyarakat Peningkatan Perlindungan Sosial Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak	
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Penataan manajemen perubahan Penataan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan ketatalaksanaan Peningkatan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Penataan sistem manajemen SDM Aparatur Peningkatan pelayanan sekretariat DPRD Fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif Penguatan pengawasan	



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2020
		Optimalisasi pembangunan Zona Integritas Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan verifikasi dan validasi kependudukan Integrasi perencanaan dan penganggaran Optimalisasi monitoring dan evaluasi Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah Peningkatan pemberdayaan masyarakat, Organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Pembangunan kawasan perdesaan Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa Peningkatan kedisiplinan aparatur Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur Optimalisasi penerapan hasil inovasi Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan Peningkatan kualitas data statistik sektoral Peningkatan penyelenggaraan persandian Penguatan kebijakan internal SPBE Penguatan tata kelola SPBE Penguatan layanan SPBE Peningkatan diseminasi informasi	



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2020
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Peningkatan penegakan Perda	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	
		Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktifitas ibadah	
		Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran	
		Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	
		Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama	
		Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh	
		Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat	
		Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya	
		Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan	
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas peternakan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas koperasi, usaha kecil dan menengah	
		Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja	
		Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru	
		Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan	
		Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah	
		Peningkatan fasilitasi transmigrasi	



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2020
		Peningkatan perlindungan konsumen	
		Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online	
		Peningkatan pengelolaan pasar	
		Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis	
		Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor	
		Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana	
		Peningkatan pengelolaan pariwisata	
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan nilai realisasi investasi	
		Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu	
		Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum	
		Peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur sanitasi	
		Peningkatan manajemen pertanahan	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman	
		Penurunan luasan kawasan kumuh	
		Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas	
		Peningkatan penyediaan fasilitasi perlengkapan jalan	



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2020
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH	
		Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup	
		Peningkatan pengelolaan persampahan	
		Peningkatan ruang terbuka hijau	
		Pembangunan taman hutan raya	
		Peningkatan jasa ekosistem	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023



Perwujudan dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus diimplementasikan kedalam program dan kegiatan yang berada di Perangkat Daerah dengan target kinerja yang diperjanjian setiap tahun anggaran. Adapun sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kudus dilaksanakan lintas Perangkat Daerah sehingga dapat efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis, IKU dan Program

No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Harapan Lama Sekolah• Rata-rata Lama Sekolah• Persentase akses dan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun- Program Pendidikan Non Formal- Program peningkatan pelayanan perpustakaan- Program peningkatan pelayanan kearsipan-	<ul style="list-style-type: none">❖ Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga❖ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Angka Harapan Hidup• Angka Kematian Ibu• Angka Kematian Bayi	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan kesehatan masyarakat- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit- Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan- Program Pelayanan Kesehatan BLUD- Program Kepemudaan- Program peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga	<ul style="list-style-type: none">❖ Dinas Kesehatan Kabupaten❖ RSUD dr Loekmonohadi❖ Dinas Sosial P3A P2 KB❖ Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none">- Program Upaya Kesehatan Masyarakat- Program pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/ rumah sakit mata- Program Keluarga Berencana	
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp./org/thn)	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan ketahanan pangan- Program pemberdayaan perempuan & perlindungan anak- Program perbardayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin- Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none">❖ Dinas Sosial P3AP2KB❖ Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Reformasi Birokrasi• Nilai akuntabilitas kinerja• Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none">- Program pembinaan kelembagaan, ketata laksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi- Program peningkatan pendapatan daerah- Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah- Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	<ul style="list-style-type: none">❖ Setda❖ BPPKAD❖ Dinas Kominfo❖ Dinas Dukcapil❖ Dinas PMD❖ Dinas Kominfo❖ Kecamatan❖ BKPP❖ Bappeda❖ Sekwan❖ Inspektorat



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none">Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Program pengelolaan perbendaharaan daerah- Program pengelolaan asset daerah- Program Pengembangan Tehnologi dan sistem Infromasi- Program Pengelolaan komunilasi dan Informasi publik- Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah- Program pengelolaan persandian- Program penataan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan HAM- Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan- Program pengelolaan barang/jasa- Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah- Program Pelayanan pendaftaran kependudukan- Program pelayanan pencatatan sipil- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data- Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none">- Program fasilitasi pemerintahan desa- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat- Program penyelenggaraan administrasi aparatur- Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur- Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur- Program perencanaan pembangunan daerah- Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya- Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam- Program Penelitian dan pengembangan daerah- Program penyelenggaraan kehumasan- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah- Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH- Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	<ul style="list-style-type: none">• Indeks rasa aman• Indeks Toleransi	<ul style="list-style-type: none">- Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat- Program Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang Trantibum- Program Fasilitasi Tata Pemerintahan- Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat- Program Pembinaan Kesatuan bangsa dan politik- Program Pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none">❖ Satpol PP❖ Kantor Kesbang Pol❖ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata❖ Setda
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• PDRB Per Kapita (juta rupiah)• Angka Kemiskinan• Angka Pengangguran	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan- Program Peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan- Program Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan- Program Peningkatan dan pengembangan pariwisata- Program peningkatan dan pengelolaan pasar	<ul style="list-style-type: none">❖ Dinas Pertanian dan pangan❖ Dinas Perdagangan❖ Dinas Naker Perinkop UKM❖ Dinas Sosial P3A P2 KB❖ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata❖ BPBD



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none">- Program pembinaan PKL dan Asongan- Program Fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen- Program penanggulangan bencana daerah- Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja- Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi- Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan- Program peningkatan dan pengembangan perindustrian- Program Peningkatan dan pengembangan KUKM	
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1. Nilai investasi (dalam triliun rupiah)	<ul style="list-style-type: none">- Program Pelayanan Perijinan pembangunan dan lingkungan- Program Pelayanan perijinan perekonomian dan jasa usaha- Program pelayanan perijinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral- Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	❖ DPMPTSP



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
			- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	2. Presentase infrastruktur dalam kondisi mantap	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya- Program pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan- Program pengembangan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh- Program perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian ruang- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah- Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ- Program peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan- Program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	<ul style="list-style-type: none">❖ Dinas PUPR❖ Dinas Perhubungan



No.	Sasaran Strategis	IKU	Program	Perangkat Daerah
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">- Program pengendalian dan konervasi LH- Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas LH- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan RTH- Program pengelolaan taman hutan raya	❖ Dinas PKPLH

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023,



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (RKPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kudus Tahun 2020 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus serta perubahannya Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kabupaten Kudus Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KABUPATEN KUDUS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas pendidikan	- Harapan lama sekolah - Rata-rata lama sekolah - Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	14,20 8,50 87,31
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Angka Harapan Hidup - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi	76,49 59,27 7,50
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	- Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita (ribu Rp./org/thn)	10.989,14
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Akuntabilitas Kinerja - Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	74,00 72,50 WTP 82,00 2,35
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	- Indeks Rasa Aman - Indeks Toleransi	0,53 100%
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	- PDRB Perkapita (juta rupiah) - Angka Kemiskinan - Angka Pengangguran	128,03 6,45 3,25
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	- Nilai Investasi (dalam triliun rupiah)	7,74
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	- Persentase (%) Infrastruktur dalam kondisi mantap	80,72
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	- Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,13

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 dan RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran berupa pelaksanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah disertai dengan sumber daya, faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja maupun faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.



Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kudus Tahun 2020
sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Harapan Lama Sekolah	14,20	13,23	93,17
2.	Rata-rata lama sekolah	8,50	8,75	102,94
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,31%	90,63	103,80
4.	Angka Harapan Hidup	76,49	76,60	100,14
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	101,57	28,67
6.	Angka Kematian Bayi	7,50	8,26	89,86
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita	10.989,14	11.160,00	101,55
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	Masih dalam proses	
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	72,50	Masih dalam proses	
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Masih dalam proses	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	86,81	105,87
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,35	3,08	131,06
13.	Indeks Rasa Aman	0,53	0,55	103,77
14.	Indeks Toleransi	100%	91,67%	91,67%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	128,03	Belum rilis	
16.	Angka Kemiskinan	6,45	7,31	86,67
17.	Angka Pengangguran	3,25	5,53	29,84
18.	Nilai Investasi	7,74	3,26	42,00
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	80,72%	83,19	103,06
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,13	64,67	100,84

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019, RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan data diolah

Berdasarkan hasil sementara pengukuran Indikator Kinerja Utama kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020, dari 20 Indikator Kinerja Utama dapat terealisasi sebanyak 16 Indikator dengan capaian rata-rata 88,32% dan 4 Indikator masih dalam proses.



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Harapan lama sekolah	13,97	13.22	94,63	14,20	13,23	93,17	14,90	88,79
2.	Rata-rata lama sekolah	8,45	8,63	102,13	8,50	8,75	102,94	9,20	95,11
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,07%	87,01%	99,93	87,31%	90,63%	103,80	88,00%	102,99
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			98,90			99,97		95,63

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 99,97%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 1,07% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 98,90%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 4,34%. dari 95,63%



2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2020 sebesar 93,17%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,46 % apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 94,63 %, Realisasi Tahun 2020 sebesar 13,23 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 13,22 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 4,38 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 88,79%.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2020 mengalami penurunan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini dikarenakan adanya pandemi yang belum berakhir sampai saat ini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,23 dibandingkan 12,70, maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

Peningkatan realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan. Namun demikian capaian realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan kemungkinan karena jumlah ketersediaan layanan pendidikan di luar kewenangan Kabupaten Kudus kurang mendapatkan perhatian seperti pendirian SMA Negeri baru di tiap kecamatan. Program yang terkait dengan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus adalah Wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan Pendidikan non formal dengan capaian realisasi anggaran rata-rata 94,02% sehingga efektifitasnya sebesar 93,17% dibanding 94,02%, yaitu 99,09%.

Angka tersebut belum menunjukkan adanya efisiensi. Kedepan agar layanan pendidikan Non Formal bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Kudus sehingga diharapkan turut meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah secara signifikan.

- b. Angka capaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 sebesar 102,94%. Angka tersebut telah melampaui target sebesar 4,36% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 102,13%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 8,75% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 8,63% mengalami kenaikan sebesar 0,12% dan angka tersebut juga



telah melampaui sebesar 0,81% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,11%.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 8,75 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (7,69)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatannya akses dan mutu pendidikan. Program yang terkait dengan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus adalah Wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan Pendidikan non formal dengan capaian realisasi anggaran rata-rata 94,02% sehingga efektifitasnya sebesar 102,94% dibanding 94,02%, yaitu 109,49%.

Angka tersebut menunjukkan adanya efisiensi sebesar 9,49%. Efektifitas dan efisiensi tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 dimana tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

- c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2020 sebesar 103,80%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 3,83% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,93%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 90,63% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 87,01% mengalami kenaikan sebesar 3,62% dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,81% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 102,99%.

Nilai tersebut telah melampaui target karena pada masa pandemi covid-19 angka kelulusan 100% , nilai akreditasi sekolah A yang sudah melampaui target Renstra sebesar 80.42% dan nilai partisipasi penduduk yang bersekolah jenjang pendidikan dasar sebesar 91.05%. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Program yang terkait dengan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus adalah Wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan Pendidikan non formal dengan capaian realisasi anggaran rata-rata 94,02% sehingga efektifitasnya sebesar 103,80% dibanding 94,02%, yaitu 110,40%. Angka tersebut menunjukkan adanya efisiensi sebesar 10,40%.



Ketiga indikator tersebut didukung dengan 6 (enam) program yaitu :

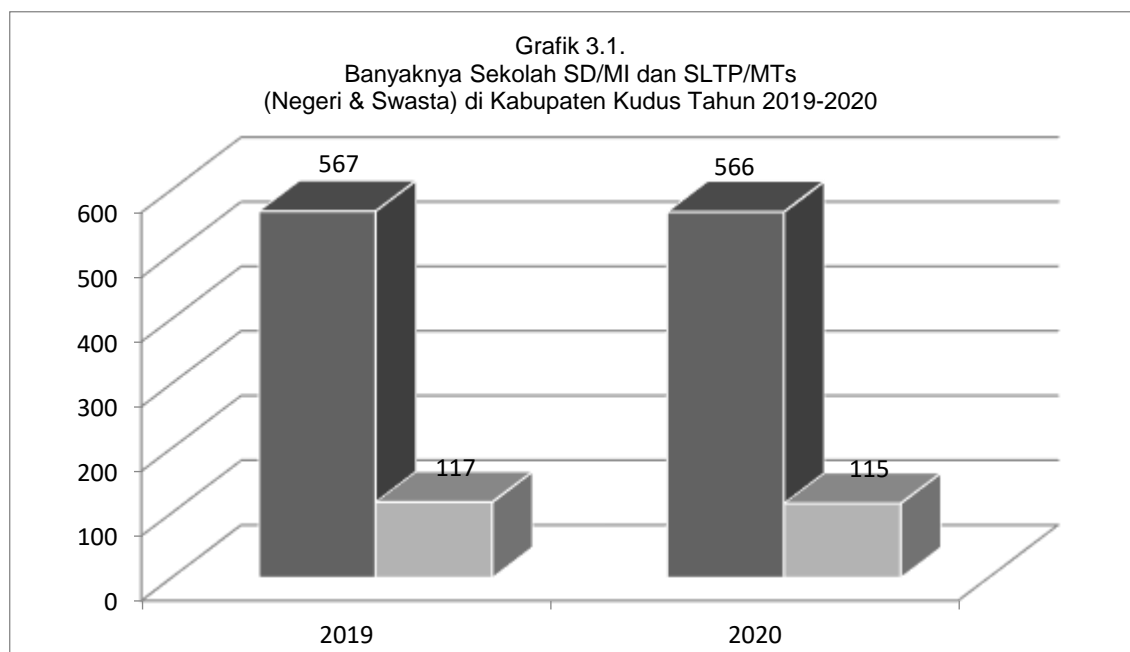
1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2. Program Pendidikan Non Formal
3. Program Peningkatan pelayanan perpustakaan
4. Program Peningkatan pelayanan kearsipan
5. Program Kepemudaan
6. Program Peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga

Pencapaian target tersebut disebabkan karena faktor :

- a. Keseriusan dari pihak Pemerintah Daerah yang ingin mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, sehingga dengan nilai capaian itu diharapkan merupakan berbanding lurus dari atau antara ketersediaan, keterjangkauan dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang pembebasan biaya operasional di sekolah-sekolah negeri (sekolah gratis), adanya pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari APBD Kabupaten Kudus tahun 2020 untuk seluruh sekolah tingkat dasar.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 99.97% atau **Sangat tinggi**.

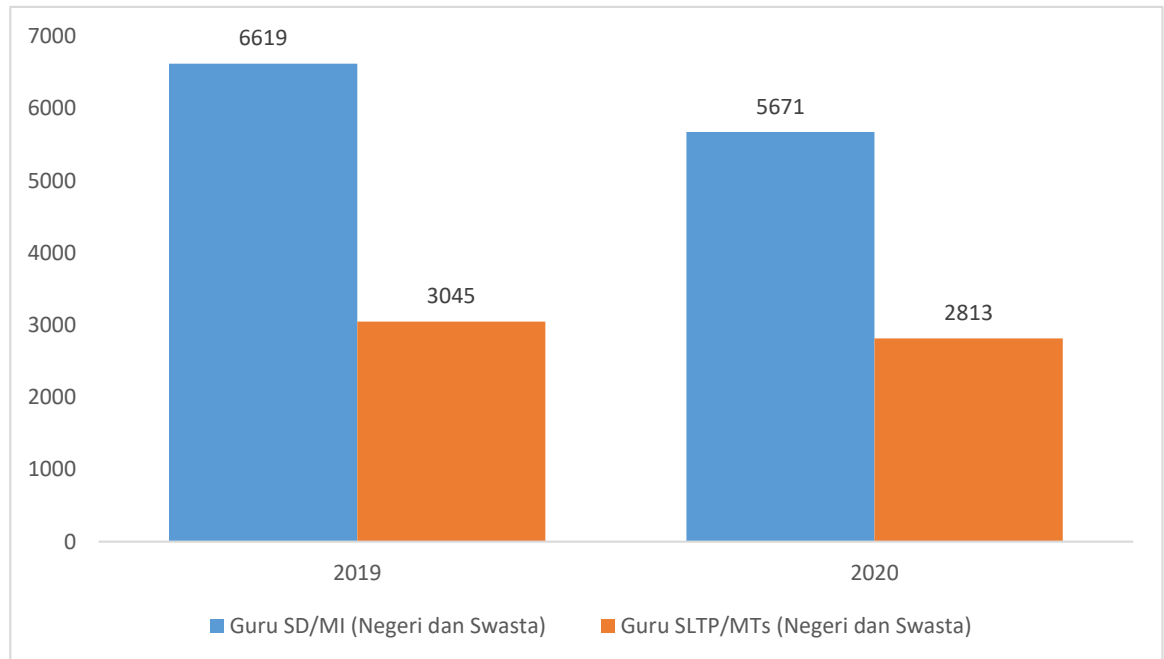
Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus :



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

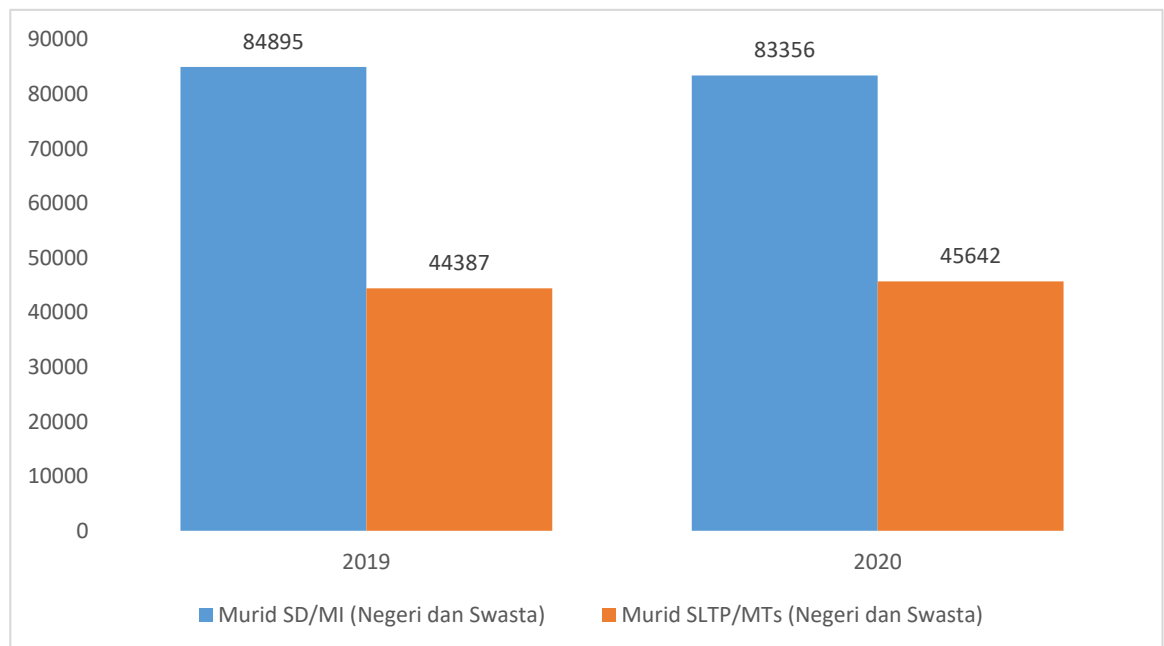


Grafik 3.2.
Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di Kabupaten
Kudus Tahun 2019-2020



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

Grafik 3.3.
Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020



Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2019 – 2020 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2019/2020 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan sebesar 0,9%. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami kenaikan jumlah murid sebesar 0,99%.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2019/2020, tersedia jumlah SD sebanyak 423 unit dan MI sebanyak 143 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 48 dan 67 unit.

Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2019/2020 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah, AKBID Mardi Rahayu, AKBID Pemda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
Tahun 2020



Perolehan Medali pada Event Nasional
Tahun 2020

Nama : Tika Budi Kartika, SE
Asal Sekolah : TPA BINTANG KECIL
Keterangan : Peserta Terbaik Kategori
KB Inovatif dan
Inspiratif pada Masa
Pandemi dalam Rangka
Hari Guru Nasional
Tahun 2020



Perolehan Medali pada Event Nasinonal
Tahun 2020

Nama : Feivel Yonathan Susanto
Asal Sekolah : SD Cahaya Nur
Cabang Lomba : Matematika
Keterangan : Peraih Medali Perunggu
KSN Jenjang SD Tingkat
Nasional

Perolehan Medali pada Event Nasinonal
Tahun 2020

Nama : Felicia Grace Angelyn F.
Asal Sekolah : SMP Masehi
Cabang Lomba : Matematika
Keterangan : Peraih Medali Emas KSN
Jenjang SMP Tingkat
Nasional



Perolehan Medali pada Event
Nasinonal Tahun 2020

Nama : Keina Nawami
Asal Sekolah : SMP 2 Dawe
Cabang Lomba : Pencak Silat
Keterangan : Juara 3 Jurus Tunggal
Putri

Perolehan Medali pada Event Nasinonal
Tahun 2020

Nama : Rika Nariana
Asal Sekolah : SMA 1 Jekulo
Cabang Lomba : Pencak Silat
Keterangan : Juara 3 Jurus Tunggal
Putri





2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angka Harapan Hidup	76.48	76,50	100,03	76,49	76,60	100,14	76,54	100,78
2.	Angka Kematian Ibu	65,97	72,90	89	59,27	101,57	28,67	52,78	7,56
3.	Angka Kematian Bayi	7,80	8,15	95	7,50	8,26	89,86	6,9	80,28
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			94,68			72,89		62,87

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 72,89%. Angka tersebut kurang sebesar 21,79% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 94,68%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 10,02% dari 62,87%



2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 100,14%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 0,11% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,03%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 76,60 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 76,50 mengalami kenaikan sebesar 0,10 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,64% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100,78%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian angka harapan hidup adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatnya sarana prasarana / fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Program /kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

- 1) Program kesehatan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi , promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan olah raga dan kesehatan kerja.
- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveilan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), berdasarkan selisih capaian kinerja 85,38 % terhadap realisasi anggaran terdapat efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebesar 5,04%

- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2020 sebesar 28,67 %. Angka tersebut kurang sebesar 60,33% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 89%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 101,57 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 72,90 mengalami kenaikan sebesar 28,67, kenaikan tersebut mempunyai arti tidak baik



karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 21,11% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 7,56%.

Permasalahan/penyebab kegagalan pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2020 karena kematian ibu merupakan masalah yang bersifat multidimensional, tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan ibu saja tapi faktor eksternal seperti infrastuktur kesehatan yang memadai serta kesadaran keluarga yang memiliki ibu hamil resiko tinggi untuk segera ke pelayanan kesehatan/ Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2020 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia, SLE, hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemi covid-19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood pilar yaitu penguatan “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

- 1) Program kesehatan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi (melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada iu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan iu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran), fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan (melalui kegiatan penguatan gerakan masyarakat hidup sehat) dan peningkatan kesehatan lingkungan,



- kesehatan olah raga dan kesehatan kerja (melalui kegiatan penguatan sanitasi dasar berbasis masyarakat)
- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi pengendalian penyakit menular (melalui kegiatan pengadaan pemeriksaan *triple eliminasi* yaitu rapid HIV, HbSAg, Sifilis, pelayanan HIV, RAD tubercolusis, DBD, Kusta) peningkatan imunisasi dan surveilans wabah / KLB / bencana (melalui kegiatan pelayanan imunisasi dasar lengkap, penanggulangan wabah covid-19) serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (melalui kegiatan pengadaan BHP posbindu, bimbingan teknis program P2 PTM dan kesehatan jiwa)
 - 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan pembiayaan kesehatan (melalui kegiatan rehabilitasi, renovasi fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan reakreditasi, pendataan keluarga sehat), pelayanan kefarmasian perbekalan dan alat kesehatan (melalui kegiatan pengadaan obat, alat kesehatan, bimbingan teknis sarana farmasi, pengelolaan e logistik, pendistribusian obat dan BMHP ke puskesmas) pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi (melalui kegiatan pemeliharaan jaringan komputer, SIK, SIPEDU dan sistem aplikasi DK, pelayanan perijinan bidang kesehatan, sertifikasi IRTIP dan pengelolaan profil SDK).

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapaian target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2020 penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi covid 19 sebanyak 8 kasus yaitu 53,33%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 26,66 % karena kelainan jantung, SLE, TB dan kelainan sistem pernafasan dan hanya 3 kasus yaitu 20 % yang berhubungan dengan kehamilan , persalinan yaitu karena eklamsia, preeklamsia berat dan perdarahan pasca persalinan

Untuk efisiensi anggaran dikarenakan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten goal akhirnya adalah pencapaian 12 indikator SPM dalam rangka meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang saling berhubungan dengan salah satu indikator penurunan AKI maka berdasarkan selisih capaian kinerja 85,38 % terhadap realisasi anggaran terdapat efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebesar 5,04%, sedangkan efektifitas dari masing masing



program kegiatan diperlukan penguatan sasaran, target dan kegiatan sehingga dampaknya dapat lebih optimal

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa kondisi Ibu benar-benar sehat sebelum menginginkan kehamilan.
 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan termasuk tenaga kesehatan yang kompeten.
 3. Meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk ke pelayanan kesehatan sehingga dapat dilakukan deteksi dini adanya faktor resiko melalui pemeriksaan fisik maupun laboratorium.
 4. Penguatan konsep safe motherhood yaitu memastikan bahwa individu maupun pasangan untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan.
- c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian bayi tahun 2020 sebesar 89,86%. Angka tersebut kurang sebesar 5,14 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 95% Realisasi Tahun 2020 sebesar 8,26 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 8,15 mengalami kenaikan sebesar 0,11 kenaikan tersebut mempunyai arti tidak baik karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi kenaikan tersebut mempunyai arti tidak baik karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 9,58% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 80,28%.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi :

1. Asfiksia sebanyak 37,38% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 31,88% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 21,73% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program kesehatan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.



Strategi yang digunakan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu :

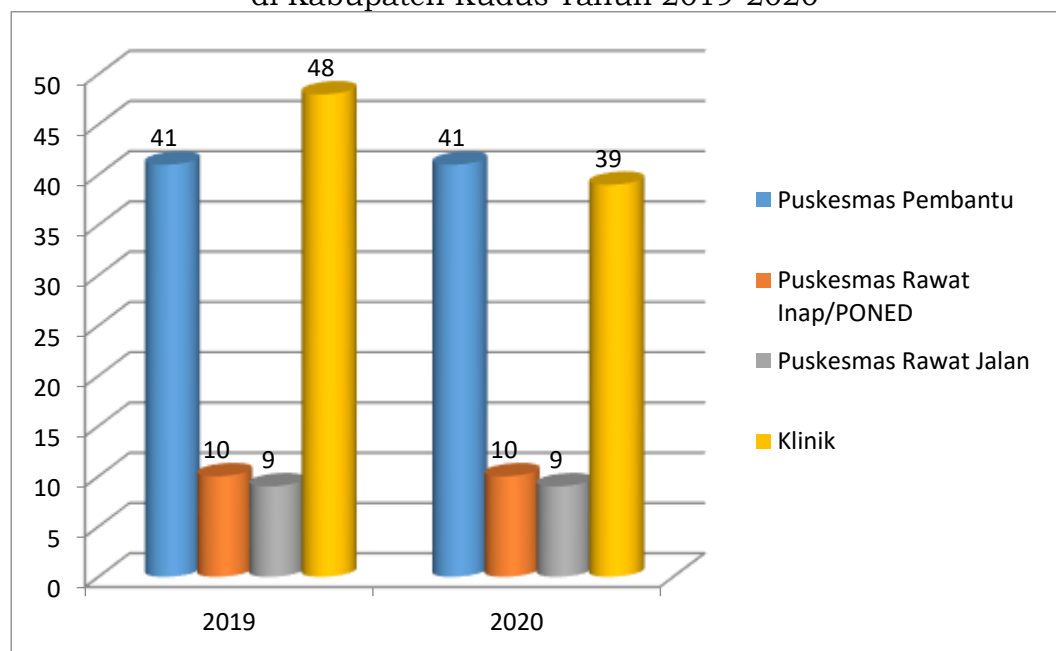
1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Untuk efiseinsi anggaran dikarenakan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten goal akhirnya adalah pencapaian 12 indikator SPM dalam rangka meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang saling berhubungan dengan salah satu indikator penurunan AKB maka berdasarkan selisih capaian kinerja 85,38 % terhadap realisasi anggaran terdapat efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebesar 5,04%, sedangkan efektifitas dari masing masing program kegiatan diperlukan penguatan sasaran, target dan kegiatan sehingga dampaknya dapat lebih optimal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 72,89 % atau **Sedang.**

Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

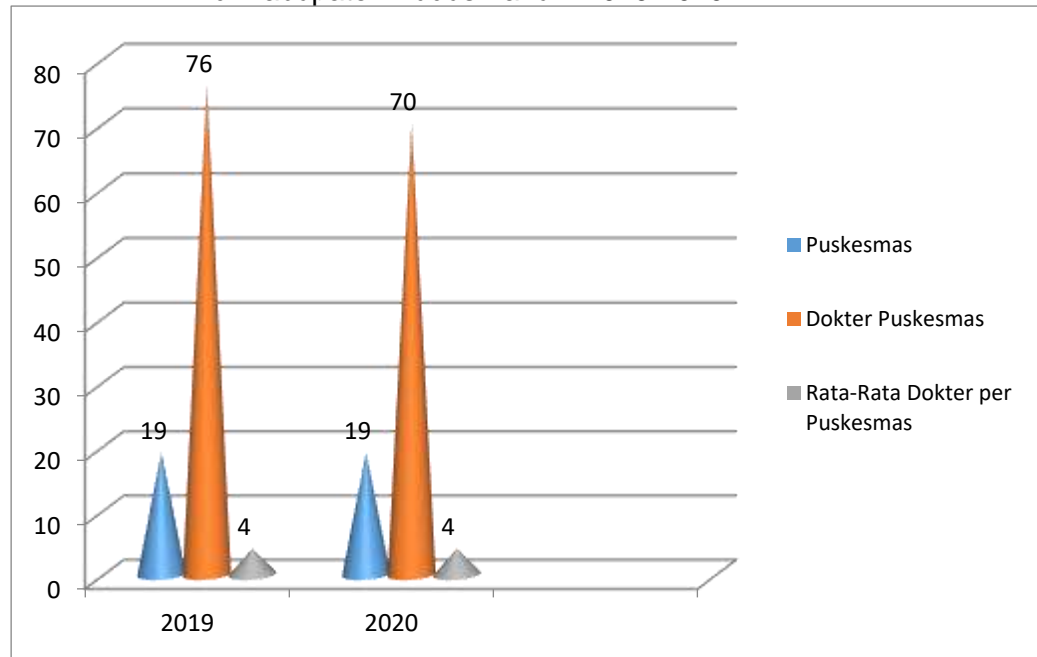
Grafik 3.4.
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat
di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020



Sumber data : DKK Tahun 2020



Grafik 3.5.
Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas
di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020



Sumber data : DKK Tahun 2020

Pada tahun 2020 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna



Penghargaan tingkat nasional
dibidang kesehatan tahun 2020.
Penghargaan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
sebagai Kabupaten Stop Buang Air
Besar Sembarangan (BABS/ODF)

Penghargaan RSUD dr.
Loekmonohadi Kategori RSUD
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
dalam Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) Award 2020

3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/ 158/2019

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Sasaran kemampuan konsumsi masyarakat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	10.847,97	11.318,00	104,33	10.989,14	11.160.00	101,55	11.413,19	97,78
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			104,33			101,55		97,78

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 101,55%. Angka tersebut kurang sebesar 2,78% dari capaian kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 104,33%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 3,77%.dari 97,78%.

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2020 sebesar 101,55%. Angka tersebut kurang sebesar 2,78% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 104,33%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 11.160,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 11.318,00 mengalami penurunan sebesar 158,00 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 3,77% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 97,78%.

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2020 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena factor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 101,55 % atau **Sangat Tinggi**



4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.5.

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	69,17	59,35	85,80	74,00	Masih dalam proses	Masih dalam proses	90	Masih dalam proses
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,50	66,36	94,13	72,50	Masih dalam proses	Masih dalam proses	83	Masih dalam proses
3,	Akuntabalitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses	Masih dalam proses	WTP	Masih dalam proses
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	82,45	101,16	82,00	86,81	105,87	85	102,13
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,73	128,17	2,35	3,08	131,06	2,87	107,32
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			102,32			118,47		104,72

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2020 Kabupaten Kudus (data diolah)



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 118,47%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 16,15% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 102,32%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 13,75%.dari 104,72%

Capaian kinerja tersebut masih ada indikator dalam proses dari KemenPan RB dan BPK.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari KemenPan RB.

Dalam Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi focus perubahan. Sebagai dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Pelayanan Publik diantaranya yaitu :

1. Peningkatan inovasi di Perangkat Daerah yang terinventarisir kedalam aplikasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pada tahun 2020 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Sangat Inovatif
2. Mewujudkan terciptanya Zona Integritas di Perangkat Daerah. Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus berhasil mewakili Kabupaten Kudus memperoleh Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
3. Kabupaten Kudus pada Tahun 2020 telah memperoleh penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Hal tersebut didukung dengan Kegiatan yang diselenggarakan maupun regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kudus.

b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari Kemen Pan RB.

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah maka dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh dengan meliputi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Kematangan Kelembagaan, Realisasi Renja, dan Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut memberikan penilaian sebagai kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik pada Tahun 2020.

c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2020 sebesar Masih dalam proses dari BPK.



Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan Tahun 2020 sudah 8 (delapan) kali dengan hasil WTP.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 105,87% Angka tersebut telah melampaui sebesar 4,71% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 101,16%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 86,81 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 82,45 melampaui sebesar 4,36 dan angka tersebut juga melampaui sebesar 3,74% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 102,13%.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu : Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara elektronik serentak pada seluruh Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik dengan hasil rata-rata pencapaian 86,81% dengan katagori Baik

- e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 sebesar 131,06%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 2,89% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 128,17%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 3,08 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 2,73 mengalami kenaikan sebesar 0,35 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 26,34% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 104,72%.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Untuk memetakan kondisi implementasi *e-government* secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari



pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE.

Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2019 mencapai nilai sebesar 2,73 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 3,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2020

Nama Indeks	Nilai	
	2019	2020
SPBE	2,73	3,08
Domain Kebijakan Internal SPBE	2,53	3,12
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,29	3,43
Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,7	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,14	2,43
Kelembagaan	1,5	2,00
Strategi dan Perencanaan	2,5	3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,33	2,33
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE mengalami kenaikan nilai. Jika dibandingkan evaluasi pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami kenaikan hanya 0,01 point, tahun 2020 ini komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ini memperlihatkan kenaikan yang cukup banyak. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus.



Dari hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE tersebut, ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

Faktor Pendukung :

1. Adanya komitmen pimpinan dalam menerapkan penggunaan teknologi dalam peningkatan layanan
2. Telah disusunnya Perbup Nomor 48 Tahun 2019 yang mengatur tentang kebijakan, tata kelola, layanan dan monitoring evaluasi SPBE.
3. Adanya beberapa layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang telah menggunakan sistem elektronik.

Faktor Penghambat :

1. Masih belum optimalnya kinerja tim pengarah SPBE
2. Belum tersusunnya rencana induk SPBE
3. Belum memiliki kebijakan proses bisnis terintegrasi
4. Belum adanya tata kelola untuk integrasi aplikasi sehingga masih banyak aplikasi yang dikembangkan secara parsial

Dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kudus masih ada beberapa kelemahan yaitu :

1. Masih belum optimalnya kinerja tim pengarah SPBE
2. Belum tersusunnya rencana induk SPBE yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE
3. Masih ada beberapa layanan yang belum terdigitalisasi
4. Masih banyak aplikasi yang dikembangkan secara parsial

Solusi :

1. Perlunya kejelasan rincian tugas tim pengarah dan perlu diagendakan pertemuan rutin dengan tim pengarah SPBE
2. Perlunya menyusun rencana induk SPBE yang memuat sasaran SPBE, kebijakan dan strategi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE
3. Perlunya memotret kondisi eksisting dan kebutuhan layanan administrasi maupun layanan publik yang ada di Kabupaten Kudus dan menyusun peta jalan pembangunan dan pengembangan aplikasi
4. Perlunya menyusun dokumen integrasi dan tata kelola aplikasi

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 118,47% atau **Sangat tinggi.**



Penghargaan Innonative Government Award (IGA) dengan kategori Sangat Inovatif



Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2020.



Penerimaan Penilaian Hasil Evaluasi dari BPK Perwakilan Jawa Tengah dengan Predikat WTP



Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dari Kementerian PAN dan RB

5. *Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama*

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :



No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks rasa aman	0,52	0,84	161,54	0,53	0,55	103,77	0,53	103,77
2.	Indeks Toleransi	100%	100%	100 %	100 %	91,67%	91,67	100 %	91,67
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			130,77			97,72		97,72

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2020 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 97,72%. Angka tersebut kurang sebesar 33,05% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 130,77%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 sama sebesar 97,72%.
2. Capaian kinerja IKU
 - a. Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2020 sebesar 103,77%. Angka tersebut kurang sebesar 57,77% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 161,54%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 0,55 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 0,84 mengalami penurunan sebesar 0,29 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 3,77% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100%.



Tabel 3.8.
Perhitungan Indeks Rasa Aman

CAKUPAN PATROLI SIAGA TIBUM TRANMAS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

NO	BULAN	JUMLAH GANGGUAN TIBUM TRANMAS						JUMLAH	TRIWULAN
		PKL	REKLAME	PGOT	MIRAS	K3	LAIN2		
1	JANUARI	28	45	24	0	12	13	122	345
2	FEBRUARI	20	69	32	5	2	11	139	
3	MARET	13	14	21	7	1	28	84	
4	APRIL	10	33	68	4	2	37	154	551
5	MEI	10	38	68	1	5	82	204	
6	JUNI	22	4	152	0	1	14	193	
7	JULI	59	37	102	1	1	58	258	546
8	AGUSTUS	64	113	69	0	0	42	288	
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	
10	OKTOBER	0	0	0	1	0	0	1	71
11	NOVEMBER	3	15	27	0	0	4	49	
12	DESEMBER	0	0	13	0	5	3	21	
JUMLAH		229	368	576	19	29	292	1513	

NO	BULAN	JUMLAH GANGGUAN TIBUM YANG TERTANGANI						JUMLAH	TRIWULAN
		PKL	REKLAME	PGOT	MIRAS	K3	LAIN2		
1	JANUARI	25	42	22	0	12	11	112	311
2	FEBRUARI	17	65	30	5	2	9	128	
3	MARET	11	11	18	7	1	23	71	
4	APRIL	8	30	63	4	2	33	140	478
5	MEI	8	33	62	1	5	64	173	
6	JUNI	20	4	130	0	1	10	165	
7	JULI	48	37	88	1	1	44	219	435
8	AGUSTUS	51	100	43	0	0	22	216	
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	
10	OKTOBER	0	0	0	1	0	0	1	69
11	NOVEMBER	3	15	25	0	0	4	47	
12	DESEMBER	0	0	13	0	5	3	21	
JUMLAH		191	337	494	19	29	223	1293	

Keterangan :

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2020 adalah 1513

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2020 yang tertangani adalah 1293

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2020 yang tidak tertangani adalah 2220

$$\begin{aligned} \text{Indeks rasa aman} &= \frac{\text{Penanganan gangguan tibum tranmas X Luas wilayah gangguan tibum tranmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{1293 \times 364}{857415} = 0,55\% \end{aligned}$$

Analisis terkait indeks rasa aman

1. Faktor yang mendukung tercapainya indeks rasa aman :

- Karena telah terjadinya komunikasi, dukungan, dan koordinasi yang baik antara instansi Penegak Perda (Satpol PP) dengan Aparat Keamanan (Polres/Kodim) serta Stakeholder lainnya.
- Terpenuhinya beberapa regulasi pendukung (telah ditetapkan Perda Kabupaten Kudus No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) pada Tahun 2020.



- Terselenggaranya kegiatan rutin patrol di wilayah Kabupaten Kudus

2. Faktor Keberhasilan yang Mendukung Indeks Rasa Aman

- Jumlah SDM, Sumber Dana, Sarana dan Prasarana
- Kepastian Regulasi dan Kepastian Hukum
- SOP, Koordinasi dan Dukungan Stakeholder

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui 7 program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Keberhasilan kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
 2. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
 3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba (P4GN).
 4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi tahun 2020 sebesar 91,67%. Angka tersebut turun sebesar 8,33% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 91,67% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 8,33% dan angka tersebut juga turun terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 8,33%.



Permasalahan yang menjadi faktor kegagalan tercapainya target adalah masih adanya 1 (satu) potensi konflik SARA yang tidak tertangani yaitu penolakan warga setempat terhadap pendirian masjid Baithul Dhohirin LDII di Desa Jepang Rt 05 Rw 02 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\text{Indeks toleransi} = \frac{\% \text{ potensi konflik sosial} + \% \text{ potensi gangguan keamanan} + \% \text{ konflik sara}}{3}$$
$$= \frac{100+100+75}{3} = 91,67\%$$

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 97,72% atau **Sangat tinggi**.



Pengarahan Plt Bupati Kudus
terkait Penanganan banjir

Tim Satgas Covid-19 yang dipimpin
oleh Plt Bupati Kudus memberikan
Pengarahan kepada masyarakat terkait
Protokol Kesehatan dengan



Bantuan untuk Tim Relawan
“CEKATIL LINK”

Aktifitas Satpol PP Penegakan Perda





6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
		Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjaya tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	121,86	121,36	99,59	128,03	Blm rilis		144,87	
2.	Angka Kemiskinan	6,70	6,68	99,70	6,45	7.31	86,67	5,90	80,71
3.	Angka Pengangguran	3,30	3,86	85,49	3,25	5,53	29,84	2,90	9,31
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			94,93			58,26		66,58

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2020 Kabupaten Kudus (data diolah)



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 73,51%. Angka tersebut kurang sebesar 21,42% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 94,93%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 6,93% dari 66,8%.

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2020 belum liris dari BPS.

b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2020 sebesar 86,67%. Angka tersebut kurang sebesar 13,03% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,70%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 7.31 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 6,68 mengalami kenaikan sebesar 0,63 (angka yang tidak diharapkan) dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 5,96% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 80,71%.

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2020 sebesar 29,84%. Angka tersebut kurang sebesar 55,65% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 85,49%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 5,53 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 3,86 kurang 1,67 sebesar 3,86 dan angka tersebut juga telah kurang sebesar 20,53% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 66,58%.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus tahun 2020 sebanyak 64.240 jiwa adapun garis kemiskinan tahun 2020 adalah 429.666. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 5,53%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020 dengan indikator peningkatan PDRB Per Kapita, Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah



menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat per kapita sehingga secara simultan menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan meningkatkan program yang meningkatkan lapangan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja siap pakai melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan *Job Fair*.

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 5,53% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 8,1%.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 58,26% atau **Rendah.**



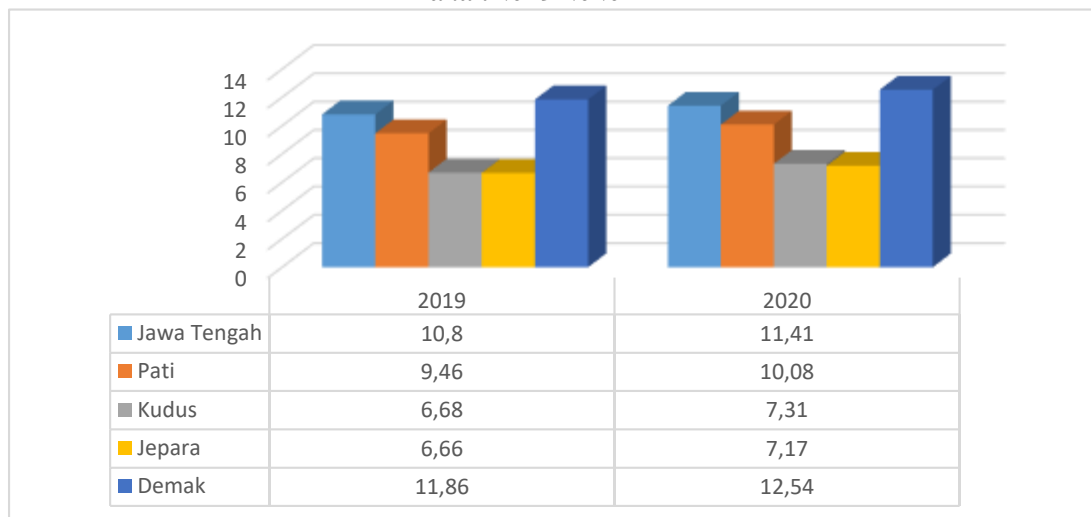
Tabel 3.10.
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2020

No.	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429 666
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2020 (rilis 2 Desember 2020)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 3.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar
Tahun 2019-2020



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2020

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun $n \times 1.05$ ($n+1$) dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019



Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Investasi	7,59 T	5,866 T	77,25	7,74 T	3,26 T	42,12	9,190 T	35,47
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			77,25			42,12		35,47

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMPSTSP Tahun 2020 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 42,12%. Angka tersebut kurang sebesar 35,13% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 77,25%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 6,65% dari 35,47%.

2) Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2020 sebesar 42,12%. Angka tersebut kurang sebesar 35,13% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 77,25%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 3,26 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 5,886 T mengalami penurunan sebesar 2,626 T dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 6,65% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 35,47%

Dengan adanya pandemi Covid 19 juga berpengaruh sekali terhadap investasi. Perkembangan realisasi investasi tahun 2016-2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 18,61 triliun pada tahun 2016 menjadi 3,26 triliun pada tahun 2020.

Begitu juga dengan pencapaian target investasi dimana sejak tahun 2016 pencapaian realisasi selalu melampaui target (diatas 100 persen) sedangkan pada tahun 2020 mencapai 42,12 persen. Beberapa penyebab terjadinya penurunan realisasi tersebut antara lain, adanya perubahan sistem pelayanan perizinan dari SIPTO menjadi OSS (Online Single Submission) berganti ke sistem OOS (online single submission) yang menjadikan realisasi investasi menjadi lebih terpuruk dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi karena masa transisi membutuhkan banyak penyesuaian, baik penyesuaian oleh pihak Pemerintah maupun pihak masyarakat yang terdampak oleh sistem baru. Karena sistem pelayanan perizinan yang ada Tahun 2020, harus dilakukan



validasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, karena ada beberapa inputing data dari pelaku usaha/investor yang mengalami kekeliruan. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018, sehingga terjadi lost perkembangan data investasi. Disamping itu, investor sering membatalkan investasinya karena lahan yang diinginkan investor bukan termasuk kawasan peruntukan industri. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kudus dari wilayah Kabupaten Kudus. Investasi yang paling banyak diminati pada Tahun 2020 di Kabupaten Kudus adalah lapangan usaha industri, perdagangan, perumahan, pergudangan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja nilai realisasi nilai investasi berskala nasional merupakan jumlah nilai investasi yang ada pada ijin (SIUP, TPD, TDI).

Faktor / penyebab kegagalan :

1. Awal Tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian diseluruh dunia berdampak sehingga kondisi pertumbuhan menurun. Hal ini menyebabkan proses investasi pada skala besar menjadi terhambat, sehingga pergerakan investasi tidak menunjukkan hasil realisasi yang maksimal.
2. Investor Luar Negeri yang masuk menggagalkan/mengurungkan niat untuk berinvestasi.
3. Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi pandemi yang mengharuskan PSBB mengakibatkan pergerakan perekonomian mengalami pembatasan produksi dan proses distribusinya. Hal ini mengakibatkan beberapa perusahaan besar mengambil kebijakan untuk mengurangi produksi dan tenaga kerjanya.

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya akan mengutamakan program peningkatan iklim investasi demi terjaganya peningkatan investasi di Kabupaten Kudus.

Strategi untuk peningkatan Investasi Daerah yaitu :

1. Melakukan pemberdayaan terhadap usaha-usaha mikro kecil melalui monitoring dan evaluasi sehingga menghasilkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar sehingga eksistensi mereka bias lebih dikembangkan sebagai usaha yang tetap produktif pada masa pandemi covid-19
2. Memberikan pendampingan terhadap pelayanan perizinan.
3. Sinkronisasi peraturan yang ada dengan peraturan pemerintah secara vertikal dan horisontal serta mengupdate peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang dapat meningkatkan



pelayanan prima dengan pengiriman diklat dan bintek bagi pegawai serta penambahan aset berupa sarana dan prasarana dengan berbasis teknologi informasi.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 42,12% atau **Sangat Rendah**

8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase, Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	79,71%	80,23%	101,26	80,72%	83,19%	103,06	83,73%	99.36
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			101,26			103,06		99,36

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 103,06%. Angka tersebut melampaui sebesar 1,8% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 101,26%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 3,7% dari 99,36%.

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2020 sebesar 103,06%. Angka tersebut melampaui sebesar 1,8% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 101,26%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 83,19 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar



81,23 melampaui sebesar 1.96 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 3,77% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 99,36%

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7.20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih banyaknya masyarakat membuang sampah di sungai (ranting bambu) sehingga pada saat musim hujan terjadi penyumbatan yang mengakibatkan banjir.
2. Pendangkalan sungai/saluran sehingga saat musim hujan terjadi banjir di daerah sekitar pangkalan.
3. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase dan dimensi saluran drainase belum memadai sehingga masih terjadi genangan air.
4. Kelebihan tonase kendaraan yang melintasi jalan kabupaten mengakibatkan adanya kerusakan jalan dilingkungan perkotaan.
5. Dimensi saluran drainase belum memadai sehingga masih terjadi genangan air
6. Beberapa kerusakan jembatan yang belum tersentuh rehabilitasi/pemeliharaan

Strategi untuk peningkatan infrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahanan aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 103,06% atau **Sangat tinggi.**



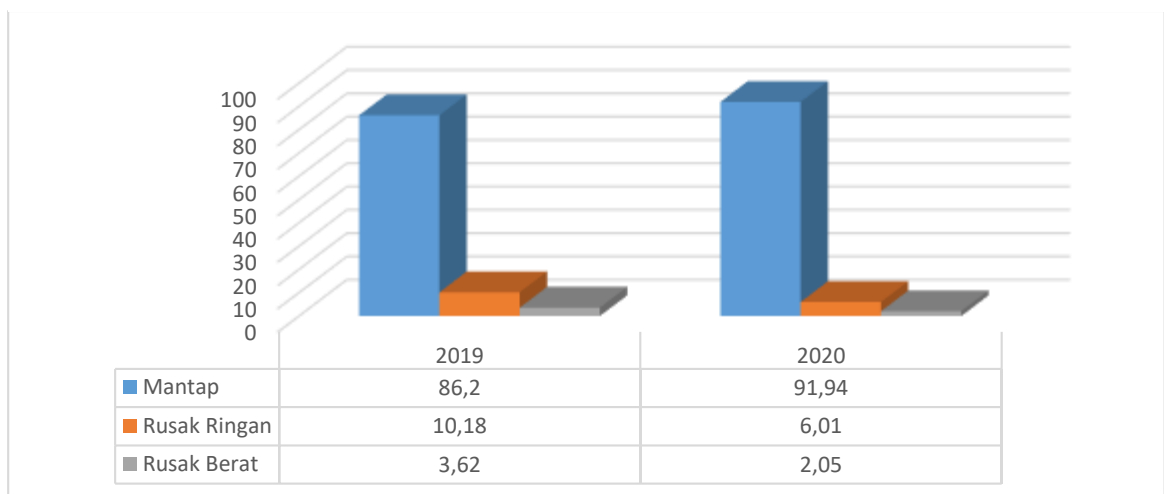
Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan, jembatan, irigasi dan saluran/drainase di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 3.13
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus Berdasarkan Kondisi
Tahun 2019-2020

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Mantap	86,20	91,94
2	Rusak ringan	10,18	6,01
3	Rusak berat	3,62	2,05

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020

Grafik 3.7.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020



Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020

Tabel 3.14
Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020

NO.	KONDISI JEMBATAN	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Baik	unit	208	312
		%	58,43	87,64
2.	Sedang	unit	106	9
		%	29,78	2,53
3.	Rusak	unit	42	35
		%	11,80	9,83
JUMLAH		unit	356	356

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020



Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel : 3.15
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2020

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40
		%	86,28	87,64
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00
		%	7,76	7,76
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00
		%	4,98	4,98
4	Rusak Berat	Ha	100,50	-
		%	0,98	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.295
		%	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020

Saluran drainase tahun 2020 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2019 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang 108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2020 Panjang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 591.446,25 meter dengan kondisi baik 43,54 % (257.605,25 m), Kondisi sedang 19,48% (115.275,00 m) sedangkan kondisi rusak 36,97% (218.743,00 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2019 adalah sebesar 60,23 % sedangkan Tahun 2020 adalah sebesar 63,03 % persentase ada peningkatan.

Tabel : 3.16
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020



Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2020 adalah sebesar 97,03 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi

Tabel : 3. 17

Cakupan Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020

Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten cakupan pelayanan penataan ruang tahun 2020 (dua) 2 dokumen yaitu Penyelesaian Ranperda Revisi RTRW Kabupaten Kudus dan Penyusunan RDTRK Kecamatan Mejobo. Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.18

Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2020

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas tanah bersertikat di tahun 2019 yaitu 74,74 % sedangkan target di tahun 2020 persentase luas tanah bersertikat 69,88 % capaian 74,80 % target terlampaui sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :



Tabel : 3.19.

Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70
2	Luas tanah Bersertipikat HGB	ha	776,22	740,5199
3	Persentase luas tanah Bersertipikat HGB	ha	1,83	1,74
4	Luas tanah Bersertipikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167
5	Persentase luas tanah Bersertipikat HP	ha	5,40	8,48
6	Luas tanah Bersertipikat HM	ha	28.662,38	27.401,2264
7	Persentase luas tanah Bersertipikat HM	ha	67,42	64,45
8	Luas tanah Bersertipikat HW	ha	41,82	62,0062
9	Persentase luas tanah Bersertipikat HW	ha	0,10	0,15
10	Total Luas tanah Bersertipikat	ha	31.777,29	31.810,6697
11	Persentase luas tanah Bersertipikat	ha	74,74	74,80

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
6. Program Penataan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
7. Program pelayanan administrasi umum.

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang



terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.

2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 103,06% atau **Sangat tinggi**.

Dokumentasi sarpras Jalan Sunan Muria City walk dan Jembatan yang ada di Kudus







9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019			2020				
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,92	63,69	101,22	64,13	64,67	100,84	67,77	95,43%
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja			101,22			100,84		95,43%

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 100,84%. Angka tersebut kurang sebesar 0,38% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2019 sebesar 101,22%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 5,41% dari target sebesar 95,43%.

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 sebesar 100,84%. Angka tersebut kurang sebesar 0,38% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 101,22%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 64,67 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 63,69 mengalami kenaikan sebesar 0,92 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,98% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,43%.



Analisa /Faktor pendukung keberhasilan

Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 100,84% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana table berikut :

Tabel 3.21
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian			
1	Indeks Kualitas Air	47,21	47,22	100,02%	46	50,85	92,86%
2	Indeks Kualitas Udara	90,28	90,34	100,07%	89,07	93,92	96,19%
3	Indeks Tutupan Lahan	57,21	58,51	102,27%	58,08	60,85	96,15%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

i. Indeks kualitas air

Angka capaian Indeks Kualitas Air tahun 2020 sebesar 100,02%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 47,22 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 46 mengalami kenaikan sebesar 1,22 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,02% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,84%. Faktor yang mendorong keberhasilan indeks kualitas air yaitu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya yang berada disekitar aliran sungai untuk tidak membuang limbah rumah tangganya ke sungai, selain itu pengusaha UMKM khususnya usaha pembuatan tahu tempe juga membuat IPAL bersama untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai. Selain kesadaran dari masyarakat, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha khususnya yang memiliki izin lingkungan juga terus ditingkatkan, dan segera menindaklanjuti setiap pengaduan terkait dengan pencemaran lingkungan.

ii. Indeks kualitas udara

Angka capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2020 sebesar 100,07%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 90,34 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 89,07 mengalami kenaikan sebesar 1,27 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,06% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 96,19%. Faktor yang mendorong keberhasilan indeks kualitas udara adalah dengan adanya pandemi covid-19 memaksa setiap orang untuk membatasi aktivitas diluar ruangan, sehingga aktivitas yang menggunakan kendaraan berkurang baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.



Selain itu adanya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di industri juga berdampak dengan berkurangnya asap hasil dari proses produksi masyarakat. Dengan berkurangnya aktivitas ini udara menjadi lebih bersih sehingga meningkatkan nilai indeks kualitas udara.

iii. Indeks tutupan lahan

Angka capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2020 sebesar 102,27%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 58,51 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 58,08 mengalami kenaikan sebesar 0,43 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 2,14% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 94,02%. Faktor yang mendorong keberhasilan indeks tutupan lahan yaitu pada tahun 2020 ini ada penambahan RTH baru di Prambatan sebesar 2 ha. Dengan tambahan ini luas tutupan lahan pada tahun 2020 menjadi 166,84 Km² dari luas tahun 2019 sebesar 164,84 Km².

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas lingkungan hidup melalui :

1. Program pengendalian dan konservasi LH
2. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4. Program pengelolaan taman hutan raya

Efektifitas Dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan. Efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 sebesar 100,84%, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar 95,82% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 9.337.450.000,- atau ada efisiensi anggaran sebesar Rp 390.035.401,- (4,18%). Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran sebesar 105, 24%.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100,84% atau kategori **Sangat tinggi**.



Dokumentasi Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2020





C. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Adapun Alokasi anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Alokasi Anggaran Program Tahun 2020

No	Sasaran	IKU	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Harapan Lama Sekolah• Rata-rata lama sekolah• Persentase akses dan mutu pendidikan	Wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun	137.473.188.000	130.624.012.002	95,02%
			Pendidikan non formal	8.587.783.000	8.065.875.906	93,02%
			Peningkatan pelayanan dan sistem Administrasi perpustakaan	18.414.000	15.096.000	81,98%
			Peningkatan pelayanan dan sistem admintrasi kearsipan	15.600.000	14.200.000	91,03%
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Angka Harapan Hidup• Angka Kematian Ibu• Angka Kematian Bayi	Peningkatan kesehatan masyarakat	4.471.275.000	3.615.190.055	81,00%
			Pencegahan dan pengendalian penyakit	19.968.325.000	16.296.257.844	82,00%
			Pelayanan dan sumber daya kesehatan	119.678.065.000		
			Pelayanan Kesehatan BLUD	139.474.226.000	147.884.568.511	96,02%
			Pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	50.995.982.000	15.693.447.241	30,77%
			Keluarga Berencana	3.509.382.000	3.160.851.439	90,07%
			Kepemudaan	611.383.000	496.290.000	81,18%
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	12.259.673.000	11.200.305.777	91,36%
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita	Peningkatan ketahanan pangan	293.821.000	284.897.225	96,96%
			Pemberdayaan perempuan & anak	1.039.923.000	913.187.730	87,81%
			Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin	560.512.000	530.782.500	94,70%
			Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial	325.365.000	313.206.000	96,26%



No	Sasaran	IKU	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	Pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	329.855.000	299.550.690	90,81%
			Peningkatan pendapatan daerah	1.364.511.000	1.275.194.652	93,45%
			Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	695.145.000	640.109.328	92,08%
			Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	498.962.000	458.617.500	91,91%
			Pengelolaan Perbendaharaan daerah	122.193.000	95.591.750	78,23%
			Pengelolaan asset daerah	666.389.000	605.881.395	90,92%
			Pengembangan teknologi dan sistem informasi	8.900.947.000	2.545.363.320	28,60%
			Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10.700.216.000	9.880.087.903	92,34\$
			Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	29.973.000	12.728.000	42,46%
			Pengelolaan persandian	47.970.000	9.291.000	19,37%
			Penataan Peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM	380.480.000	330.861.434	86,96%
			Peningkatan perekonomian daerah	33.050.000	31.856.921	96,39%
			Pengelolaan administrasi pembangunan	59.000.000	52.168.400	88,42%
			Pengelolaan barang/jasa	1.065.171.000	853.260.777	80,11%
			Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.126.249.000	994.534.566	88,31%
			Pelayanan pendaftaran kependudukan	3.064.774.000	2.709.256.922	88,40%
			Pelayanan pencatatan sipil	1.035.622.000	886.775.477	85,69%
			Penelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	1.093.783.000	917.915.162	83,92%
			Fasilitasi pemerintahan desa	2.006.224.000	1.736.235.397	86,54%



No	Sasaran	IKU	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat	4.191.691.000	3.998.919.900	95,40%
			Penyelenggaraan administrasi aparatur	130.640.000	102.266.465	78,28%
			Pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	782.960.000	637.857.815	81,47%
			Pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	4.464.429.000	3.135.753.983	70,24%
			Perencanaan pembangunan daerah	1.593.219.000	1.562.481.455	98,07%
			Perencanaan pemerintahan dan sosial budaya	108.140.000	104.235.600	96,39%
			Perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	94.194.000	93.794.100	99,58%
			Penelitian dan pengembangan daerah	128.490.000	126.045.600	98,10%
			Penyelenggaraan kehumasan	1.342.037.000	1.289.549.000	96,09%
			Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	35.871.202.000	24.842.473.000	69,25%
			Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.310.021.000	1.091.254.000	83,30%
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Rasa Aman Indeks Toleransi 	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2.033.238.000	1.951.970.716	96,01%
			Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	970.654.000	951.379.685	98,01%
			Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibun	225.000.000	184.792.395	82,13%
			Fasilitasi Tata Pemerintahan	161.996.000	143.558.878	88,62%
			Peningkatan Kesejahteraan rakyat	40.595.065.000	36.583.571.522	90,12%
			Pembinaan kesatuan bangsa dan politik	466.868.000	403.856.000	86,51%
			Pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	1.989.799.000	1.166.227.112	58,61%



No	Sasaran	IKU	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> PDRB Per Kapita (jutaan rupiah) Angka Kemiskinan Angka Pengangguran 	Peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian /perkebunan	4.059.887.000	3.857.900.500	95,02%
			Peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	279.383.000	260.221.935	93,14%
			Pembinaan dan pengembangan budi daya perikanan	129.110.000	125.970.500	97,57%
			Peningkatandan pengembangan pariwisata	2.740.259.000	2.477.162.640	90,40%
			Peningkatan dan pengeloan pasar	3.213.278.000	2.501.882.011	77,86%
			Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	47.933.000	42.957.400	89,61%
			Fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen	2.115.999.000	196.016.593	9,20%
			Penanggulangan Bencana Daerah	1.118.459.000	970.787.580	86,80%
			Perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	3.984.608.000	3.837.697.921	96,31%
			Fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	15.000.000	4.594.000	30,63%
			Pembinaan perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	116.515.000	110.815.000	95,11%
			Peningkatan dan pengembangan perindustrian	783.825.000	755.607.549	96,40%
			Peningkatan dan pengembangan KUKM	2.288.600.000	2.048.573.436	89,51%
7.	Meningkatnya daya saing investasi	Nilai Investasi (dalam triliun rupiah)	Pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan	154.160.000	146.177.100	94,82%
			Pelayanan perijinan perekonomian dan jasa usaha	14.230.000	13.430.000	94,38%
			Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	93.080.000	82.891.300	89,05%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	52.030.000	27.568.000	52,98%



No	Sasaran	IKU	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.215.089.000	1.677.964.721	85,10%
			Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	11.901.932.000	10.871.480.204	86,22%
			Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	62.069.512.000	54.887.043.163	88,77%
			Pengembangan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh	38.302.365.000	33.263.658.195	86,84%
			Perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian ruang	492.345.000	362.385.599	73,60%
			Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan	21.918.725.000	4.820.674.019	21,99%
			Peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ	3.105.735.000	3.041.314.000	97,93%
			Peningkatan manajemen pengelola lalu lintas dan angkutan jalan	209.195.000	178.588.000	85,37%
9.	Meningkatnya Keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	37.319.703.000	36.069.813.084	96,65%
			Pengendalian dan konvensi LH	522.036.000	499.862.605	95,75%
			Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas LH	68.545.000	58.954.750	86,01%
			Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	8.741.514.000	8.383.287.244	95,90%
			Pengelolaan taman hutan raya	5.355.000	5.310.000	99,16%
			JUMLAH	837.041.481.000	613.394.025.099	73,38%

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 837.041.481.000,- untuk 83 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2020 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 613.394.025.099,-



D. EFISIENSI ANGGARAN

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Harapan Lama Sekolah	Wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun	14,20	13,23	93,17%	137.473.188.000	130.624.012.002	95,02%	-1,98%
		• Rata-rata lama sekolah	Pendidikan non formal	8,50	8,75	102,94%	8.587.783.000	8.065.875.906	93,02%	8,76%
		• Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Peningkatan pelayanan dan sistem Administrasi perpustakaan	87,31	90,63	103,80%	18.414.000	15.096.000	81,98%	21,02%
			Peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan				15.600.000	14.200.000	91,03%	
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Angka Harapan Hidup	Peningkatan kesehatan masyarakat	76,49	76,60	100,14%	4.471.275.000	3.615.190.055	81,00%	19,26%
		• Angka Kematian Ibu	Pencegahan dan pengendalian penyakit	59,27	101,57	28,67%	19.968.325.000	16.296.257.844	82,00%	-184,65%
		• Angka Kematian Bayi	Pelayanan dan sumber daya kesehatan	7,50	8,26	89,86	119.678.065.000	95.233.308.143	79,57%	27,75%
			Pelayanan Kesehatan BLUD				154.011.458.000	147.884.568.511	96,02%	
			Kepemudaan				611.383.000	496.290.000	81,18%	
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga				12.259.673.000	11.200.305.777	91,36%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata				50.995.982.000	15.693.447.241	30,77%	
			Keluarga Berencana				3.509.382.000	3.160.851.439	90,07%	
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Peningkatan ketahanan pangan	10.989,14	11.160,00	101,55	293.821.000	284.897.225	96,96%	4,52%
			Pemberdayaan perempuan & anak				1.039.923.000	913.187.730	87,81%	
			Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin				560.512.000	530.782.500	94,70%	
			Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial				325.365.000	313.206.000	96,26%	
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	74,00	Masih dalam proses		329.855.000	299.550.690	90,81%	
		Nilai Akutabititas Kinerja		72,50	Masih dalam proses					
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Peningkatan pendapatan daerah				1.364.511.000	1.275.194.652	93,45%	
			Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	WTP	Masih dalam proses		695.145.000	640.109.328	92,08%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah				498.962.000	458,617.500	91,91%	
			Pengelolaan Perbendaharaan daerah				122.193.000	95.591.750	78,23%	
			Pengelolaan asset daerah				666.389.000	605.881.395	90,92%	
		• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan teknologi dan sistem informasi	2,35	3,08	131,06	8.900.947.000	2.545.363.320	28,60%	78,18%
			Pengelolaan komunikasi dan informasi publik				10.700.216.000	9.880.087.903	92,34%	
			Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah				29.973.000	12.728.000	42,46%	
			Pengelolaan persandian				47.970.000	9.291.000	19,37%	
		• Indek Kepuasan Masyarakat	Penataan Peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM	82,00	86,81	105,87	380.480.000	330.861.434	86,96%	
			Peningkatan perekonomian daerah				33.050.000	31.856.921	96,39%	
			Pengelolaan administrasi pembangunan				59.000.000	52.168.400	88,42%	
			Pengelolaan barang/jasa				1.065.171.000	853.260.777	80,11%	
			Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				1.126.249.000	994.534.566	88,31%	
			Pelayanan pendaftaran kependudukan				3.064.774.000	2.709.256.922	88,40%	
			Pelayanan pencatatan sipil				1.035.622.000	886.775.477	85,69%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Penelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data				1.093.783.000	917.915.162	83,92%	
			Fasilitasi pemerintahan desa				2.006.224.000	1.736.235.397	86,54%	
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat				4.191.691.000	3.998.919.900	95,40%	
			Penyelenggaraan administrasi aparatur				130.640.000	102.266.465	78,28%	
			Pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur				782.960.000	637.857.815	81,47%	
			Pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur				4.464.429.000	3.135.753.983	70,24%	
			Perencanaan pembangunan daerah				1.593.219.000	1.562.481.455	98,07%	
			Perencanaan pemerintahan dan sosial budaya				108.140.000	104.235.600	96,39%	
			Perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam				94.194.000	93.794.100	99,58%	
			Penelitian dan pengembangan daerah				128.490.000	126.045.600	98,10%	
			Penyelenggaraan kehumasan				1.342.037.000	1.289.549.000	96,09%	
			Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				35.871.202.000	24.842.473.000	69,25%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				1.310.021.000	1.091.254.000	83,30%	
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0,53	0,55	103,77	2.033.238.000	1.951.970.716	96,01%	7,49%
			Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran				970.654.000	951.379.685	98,01%	
			Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum				225.000.000	184.792.395	82,13%	
		• Indeks Toleransi	Fasilitasi Tata Pemerintahan	100%	91,67%	91,67%	161.996.000	143.558.878	88,62%	3,33%
			Peningkatan Kesejahteraan rakyat				40.595.065.000	36.583.571.522	90,12%	
			Pembinaan kesatuan bangsa dan politik				466.868.000	403.856.000	86,51%	
			Pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya				1.989.799.000	1.166.227.112	58,61%	
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	• PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian /perkebunan	128,03	Belum rilis		4.059.887.000	3.857.900.500	95,02%	
		• Angka Kemiskinan	Peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	6,45	7,31	86,67	279.383.000	260.221.935	93,14%	17,82%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
		• Angka Pengangguran	Pembinaan dan pengembangan budi daya perikanan	3,25	5,53	29,84	129.110.000	125.970.500	97,57%	42,66%
			Peningkatandan pengembangan pariwisata				2.740.259.000	2.477.162.640	90,40%	
			Peningkatan dan pengeloaan pasar				3.213.278.000	2.501.882.011	77,86%	
			Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				47.933.000	42.957.400	89,61%	
			Fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen				2.115.999.000	196.016.593	9,20%	
			Penanggulangan Bencana Daerah				1.118.459.000	970.787.580	86,80%	
			Perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja				3.984.608.000	3.837.697.921	96,31%	
			Fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi				15.000.000	4.594.000	30,63%	
			Pembinaan perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan				116.515.000	110.815.000	95,11%	
			Peningkatan dan pengembangan perindustrian				783.825.000	755.607.549	96,40%	
			Peningkatan dan pengembangan KUKM				2.288.600.000	2.048.573.436	89,51%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan	7,40	3,26	42	154.160.000	146.177.100	94,82%	-115,24%
			Pelayanan perijinan perekonomian dan jasa usaha				14.230.000	13.430.000	94,38%	
			Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal				93.080.000	82.891.300	89,05%	
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal				52.030.000	27.568.000	52,98%	
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	80,72	83,20	103,05	2.215.089.000	1.677.964.721	85,10%	26,51%
			Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				11.901.932.000	10.871.480.204	86,22%	
			Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan				62.069.512.000	54.887.043.163	88,77%	
			Pengembangan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh				38.302.365.000	33.263.658.195	86,84%	
			Perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian ruang				492.345.000	362.385.599	73,60%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan				21.918.725.000	4.820.674.019	21,99%	
			Peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ				3.105.735.000	3.041.314.000	97,93%	
			Peningkatan manajemen pengelola lalu lintas dan angkutan jalan				209.195.000	178.588.000	85,37%	
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	64,13	64,67	100,84	37.319.703.000	36.069.813.084	96,65%	4,16%
			Pengendalian dan konvensi LH				522.036.000	499.862.605	95,75%	
			Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas LH				68.545.000	58.954.750	86,01%	
			Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				8.741.514.000	8.383.287.244	95,90%	
			Pengelolaan taman hutan raya				5.355.000	5.310.000	99,16%	
			JUMLAH			88,32%	837.041.481.000	613.394.025.099	73,38%	19,30%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2020 Capaian Kinerja 88,32%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 73,38%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 19,30%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran.



E. IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN RB maka Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun Peraturan Bupati Kudus tanggal 2 Maret 2020 Tentang Rencana Aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun Aksi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
Aksi : Reviu dan monev berkala pada Program dan kegiatan yang dikoordinasi oleh Bappeda dan BPPKAD
2. Pengukuran Kinerja
Aksi : Penyusunan cascading hingga level individu yang dikoordinasi oleh Bappeda, Bagian Organisasi, Inspektorat dan BKPP
3. Pelaporan Kinerja
Aksi : - Monev dokumen SAKIP
- Penyusunan dokumen Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah yang optimal dikoordinasi oleh Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat
4. Evaluasi Kinerja
Aksi : Evaluasi dan monev berkala kinerja dikoordinasi oleh Bappeda, Bagian Organisasi
5. Pencapaian Kinerja
Aksi : Meningkatkan Kuantitas dan kualitas evaluasi internal yang dikoordinasi oleh Inspektorat

Tabel : 3.24

RENCANA AKSI DALAM RANGKA AKSELERASI IMPLEMENTASI SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

No	Rencana Aksi	Indikator	Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Monev dokumen SAKIP	Tetib administrasi dokumen SAKIP	- Perjanjian Kinerja (Awal dan Perubahan) - LKjIP Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah	- Bagian Organisasi - Inspektorat	√	√	√	√



No	Rencana Aksi	Indikator	Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	Evaluasi dan monev berkala kinerja	Terukur target dan realisasi kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Evaluasi Renja tribulanan	- Bagian Organisasi - Bappeda		√	√	√
3.	Reviu dan monev berkala pada Program dan kegiatan	Kesesuaian antara Program dan Kegiatan dengan Target RPJMD untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen identifikasi Perubahan Program dan Kegiatan	- Bappeda - BPPKAD		√		
4.	Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja	Keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja untuk menilai efektivitas dan efisien anggaran	- SIPD	- Bappeda - BPPKAD - Bagian Organisasi				√
5.	Penyusunan cascading hingga level individu	Pengukuran kinerja organisasi secara efektif	- <i>Cascading</i> dari level Pimpinan s.d individu - <i>Perbup Reward and Punishment</i>	- Bappeda - Bagian Organisasi - Inspektorat - BKPP			√	
6.	Penyusunan dokumen Kinerja Pemkab dan Perangkat Daerah yang optimal	Laporan kinerja Pemkab dan OPD menyajikan analisa pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan efisiensi penggunaan anggaran dan data yang lengkap	- <i>Workshop</i> Penyusunan LKj IP	Bagian Organisasi				√
7.	Meningkatkan Kuantitas dan kualitas evaluasi internal	Pelaksanaan evaluasi Implementasi SAKIP kepada semua Perangkat Daerah	- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	√			



Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pemberian Penghargaan
pada Perangkat Daerah berkinerja Tinggi sebagai Implementasi SAKIP di
Kabupaten Kudus





BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan penguatannya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kudus telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya.

Sebanyak 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Secara Umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Kudus telah mengalokasikan APBD sebesar Rp.2.151.998.364.390,-. Anggaran tersebut digunakan untuk 9 sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2020 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai $91\% \leq 100\%$), Tinggi (nilai $79\% \leq 90\%$), Sedang (nilai $66\% \leq 75\%$), Rendah (nilai $51\% \leq 65\%$) dan Sangat Rendah (nilai $\leq 50\%$), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 9 sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 sasaran, dalam kategori sedang sebanyak 1 sasaran, dalam kategori rendah sebanyak 1 sasaran, dan kategori sangat rendah sebanyak 1 sasaran.



Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel : 4.1.

Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	99,97%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	72,89 %	Sedang
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	101,55 %	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	118,47%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	97,72%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	58,26%	Rendah
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	42,12%	Sangat Rendah
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	103,06%	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	100,84%	Sangat Tinggi

A. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Kudus selama Tahun 2020, antara lain adalah :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2019, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 74,94 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 8,63 dan harapan lama sekolah tahun 2019 sebesar 13,22. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :



a. Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia antara lain semakin lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai “ke-Bhineka Tunggal Ika-an” dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

b. Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi pada tahun 2019 yaitu 8,15 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 72,90 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup



penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2018 sebesar 68,19, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2020. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2019 sebesar 0,01 cenderung relative stabil dan turun dari tahun 2018 sebesar 0,02. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui



fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,98% (59.990 jiwa) pada tahun 2018 menjadi 6,68% (58.000 jiwa) pada tahun 2019. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2019 sebesar 3,86% atau sebesar 18.720 jiwa.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus.



Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Melaksanakan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas sasaran utamanya pada beberapa sasaran yang menjadi pemicu bagi sentra-sentra percepatan pertumbuhan perekonomian.
2. Mengoptimalkan dan menyusun indikator outcome perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
3. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari semua urusan pemerintahan agar direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut.
4. Terintegrasinya system e planning, e budgeting dan e SAKIP agar kinerja Perangkat Daerah tercapai secara optimal.

Kudus, Maret 2021



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

LAMPIRAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TAHUN 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Harapan Lama Sekolah	13,97	14,20	14,44	14,67	14,90	14,90
2.	Rata-rata Lama Sekolah	8,45	8,50	8,70	9,01	9,20	9,20
3.	Persentase akses dan mutu pendidikan	87,07	87,31	87,54	87,77	88,00	88,00
4.	Angka Harapan Hidup	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
5..	Angka Kematian Ibu	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
6.	Angka Kematian Bayi	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp./org/thn)	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	11.413,19	11.413,19
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	69,17	74	79	85	90	90
9.	Nilai akuntabilitas kerja	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00
10.	Akuntabilitas pegelola keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	82	83	83,5	85	85
13.	Indeks rasa aman	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
16.	Angka Kemiskinan	6,7	6,45	6,21	6,1	5,9	5,9
17.	Angka Pengangguran	3,30	3,25	3,15	3,05	2,90	2,90
18.	Nilai investasi (dalam triliun rupiah)	7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	9,19
19.	Presentase infrastruktur dalam kondisi mantap	79,71	80,72	81,72	82,72	83,73	83,73
20.	Indekes Kualitas Lingkungan Hidup	62,92	64,13	65,34	66,56	67,77	67,77

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023